

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa simpulan dan saran. Program Jakpreneur yang merupakan program pemberdayaan pelaku usaha di Pemerintahan Provinsi DKI sangat dibutuhkan dan tepat diterapkan dari segala dinamika usaha industri di DKI jakarta. Salah satu kota administrasi di DKI Jakarta yang melaksanakan program ini adalah kecamatan Kembangan yang berlokasi di Jakarta Barat.

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang telah dilakukan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sudah terlaksana dengan baik, oleh karena itu perlunya meningkatkan komunikasi lebih kuat melalui sosialisasi rutin dan berkala kepada pelaku Umkm dan disesuaikan dengan kondisi faktual dengan membawa mendekatkan program kepada UKM untuk memanfaatkan momentum tersebut sehingga dapat meningkatkan jumlah peserta Jakpreneur di tahun mendatang untuk meningkatkan kesadaran/awareness di kalangan UKM mengenai pentingnya program ini untuk meningkatkan produk dari UMKM guna keberlangsungan hidup mereka selanjutnya. Langkah-langkah konkret dan praktis yang bisa diterapkan dalam merekrut peserta Jakpreneur sebagai berikut: Peserta wajib punya email, Nomor HP untuk dimasukkan ke dalam WA grup agar informasi terkait Jakpreuneur dapat disampaikan dikomunikasikan antara pendamping dan binaan sesuai kategori usahanya, Peserta datang langsung ke Kecamatan. Perlunya koordinasi berkala untuk memantau progress capaian target program Jakpreneur , Pejabat penyelenggara menyampaikan pesan terarah dan menciptakan kondisi tidak kaku pada saat pelatihan-pelatihan *softskill*, *hardskill*. Sebaiknya diadakan teknikal meeting persiapan sebelum kegiatan pelatihan-pelatihan ataupun bazar-bazar dilaksanakan.

2. Teknologi penunjang komunikasi belum maksimal. Perlunya memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelaksanaan Jakpreneur sehingga tercapai kualitas pelayanan yang unggul seperti perbaikan perangkat lunak aplikasi sistem Jakpreneur agar lebih mudah dipahami (user friendly) oleh para pelaku usaha juga perbaikan jaringan komunikasi anti hambatan agar dapat menjangkau semua wilayah. Diperlukan juga persiapan SDM ketika vendor mengundurkan diri atau habis masa kontrak kerjasama.
3. SDM pelaksana/ pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan program Jakpreneur secara umum sudah mampu melaksanakan dengan kemampuan dan tuntutan pekerjaan yang dihadapi namun masih ada catatan yg semestinya diperhatikan contohnya peserta pelaku umkm dengan latar belakang yang berbeda-beda baik pendidikan maupun keterampilan, skill budaya sehingga membentuk pemahaman yang berbeda-beda dalam menangkap apa yang disampaikan oleh pelaksana program Jakpreneur. Hal ini membutuhkan kemampuan khusus dari implementator untuk mampu menyampaikan pesan program kegiatan agar mudah dipahami. Dibutuhkan Peningkatan kualitas SDM melalui bimtek IPTEK, Bimtek Kewirausahaan, seminar/workshop motivasi dari penggerak Umkm, Para Influencer dari media sosial, training public speaking. Rasio jumlah implementator tidak sebanding dengan jumlah peserta. Sehingga masih membutuhkan tambahan sumber daya manusia implementator/pelaksana, supaya hasil pembinaan yang diberikan maksimal sehingga harapannya mereka bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas Jakpreneur yang sama dan bisa menuntaskan mereka menjadi entrepreneur yang berkualitas dan mandiri.
4. Sikap dan karakteristik petugas/ aparat sudah bertanggung jawab terhadap pekerjaan dimana petugas/ aparat telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam mendaftarkan Program Jakpreneur, namun implementasi di lapangan penulis menemukan SOP (Standart Operasional Prosedur) ada hanya masih terpusat di Sudin PPKUKM, belum terintegrasi ke seluruh SKPD sehingga menimbulkan komunikasi yang tidak selaras dan tumpang tindih. Diperlukan penyusunan SOP bersama seluruh Sudin pengampu Jakpreneur

agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat berjalan secara tertib, teratur dan terukur.

#### 5. Struktur Birokrasi/ Organisasi (*Bureaucratic Structure*)

Peran aparatur pelaksana Sudin Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Barat sudah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Program Jakpreneur. Juga unit terkait atau instansi terkait lainnya turut berpartisipasi dalam kegiatan Program Jakpreneur secara bersama dengan SKPD Pengampu namun masih terlihat pembagian tugas antar unit SKPD yang tidak selaras dan belum berimbang melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Dibutuhkan Penguatan struktur birokrasi yang efektif dan efisien serta menerapkan pola right man on the right place berdasarkan uji kompetensi.

### B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengemukakan beberapa saran:

1. Pelaksanaan di lapangan musti lebih agresif lagi agar dapat menjangkau luas pengusaha-pengusaha UKM yang belum terjamah agar target pencapaian yang sudah ditetapkan dapat terwujud. Program Jakpreneur adalah wujud dari komitmen Dinas PPKUKM (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil menengah) di Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan usaha kecil menengah yang konsisten menyediakan pasar untuk para pelaku Ukm agar makin berkembang lewat event kolaborasi dengan toko-toko digital yang diselenggarakan secara online ataupun onsite sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini, sehingga para konsumen dapat berbelanja produk UMKM Jakpreneur dari rumah supaya terhindar juga dan terjaga dari keterpaparan virus Covid 19 yang belum bisa dipastikan punah.
2. Penerapan Komunikasi berbasis digital dalam Implementasi Program jakpreneur sudah cukup mendukung. Sangat dibutuhkan penyediaan sarana dan fasilitas jaringan telekomunikasi anti hambatan dan lebih luas jangkauannya ke wilayah-wilayah yang terpencil dan sulit dijamah sehingga kedepannya komunikasi dan sosialisasi diharapkan dibangun lebih kuat lagi disesuaikan dengan kondisi di lapangan artinya lebih mendekatkan ke pelaku

Ukm supaya mampu memanfaatkan momentum ini bagi peningkatan jumlah peserta Jakpreneur di tahun mendatang. Hal ini akan berdampak kepada perbaikan kesadaran mindset kepada pelaku Ukm terhadap pentingnya program ini bagi kelangsungan hidup mereka selanjutnya.

3. SOP untuk mengikuti program Jakpreneur sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu kehadiran Pemerintah masih sangat dibutuhkan pelaku Ukm sebagai fungsi penyedia pembinaan dan pelatihan terutama bagi pelaku Ukm yang belum mahir digital. Perlu dibentuk pola pikir perubahan dengan penerapan pola-pola pelatihan yang lebih canggih dan modern berbasis digital sesuai dengan kebutuhan pelaku Ukm dan tuntutan jaman di era digital ini Diharapkan pemerintah memfasilitasi model-model pelatihan pembinaan kewirausahaan baik softskill ataupun hardskill yang lebih berinovasi, kreatif sesuai dengan minat dan keahlian setiap pelaku usaha yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini yang bervariasi dan dibutuhkan instan.
4. Perlu upaya dari Sudin PPKUKM untuk melakukan pendataan langsung/mendekatkan kepada pelaku Ukm supaya mendapat kondisi riil dari pelaku usaha tersebut.
5. Memastikan kemudahan mendapatkan Perijinan ataupun Pengajuan pinjaman modal usaha.
6. Pemda dapat memfasilitasi pembelajaran kewirausahaan bagi masyarakat melalui pelatihan pelatihan kewirausahaan terpadu, dan memperkuat kurikulum pembelajaran kewirausahaan di sekolah-sekolah formal sejak dini di SD, SMP dan SMA. Khusus di Perguruan Tinggi yang sudah ada matakuliah kewirausahaan lebih dimatangkan lagi dan diharapkan terus berlanjut. Diharapkan agar para dosen benar-benar memberikan dorongan yang kuat kepada mahasiswa untuk mulai membuka usaha, meskipun masih dalam kondisi studi.
7. Memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan mengambil langkah-langkah lebih tepat yang praktis, melalui kegiatan formal misalnya melalui tugas pokok yang sedang dilaksanakan (lembaga-lembaga resmi berbadan hukum) dan informal melalui kegiatan kemasyarakatan bersama pelaku usaha

- yaitu belanja hasil Kerajinan, promosi handcraft, dialog strategi pengembangan usaha, dan lain lain.
8. Memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder ataupun stockholder serta pihak-pihak terkait terlibat aktif mengembangkan program Jakpreneur bagi kepentingan masyarakat dan negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin, Said Zainal. 2008. *Kebijakan Publik*, Jakarta, Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah
- Arif, Saiful. 2000. *Menolak Pembangunanisme*, Jakarta: Pustaka Pelajar;
- Bintoro Tjakroamidjojo. 1995. *Manajemen Pembangunan*, Jakarta, CV Haji Masagung
- Danim, Sudarwan. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Edward III, George. E. 1980. *Implementasi Publik, Policy Congresinal*, Quartely Press
- Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta, STIA LAN Press
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Buku I Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara;
- Lembaga Administrasi Negara. 2004. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Buku III Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara;

- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Buku II: Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2004. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Buku II: Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara;
- Mustopadidjaja. 2003a. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara;
- Lembaga Administrasi Negara. 2003b. *Dimensi-Dimensi Pokok Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara;
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, CV.Alfabeta.
- Susanto, Hery. 2003. *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, Jakarta: PT Dyatama Mehenia;
- Siagian, Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung
- Sutansyah, Deni. 2004. *Implementasi Kebijakan Tata Kearsipan pada Pusat Penelitian Oseanografi LIPI*, Skripsi Program Sarjana STIA LAN RI Jakarta
- Syukur Abdullah, Muhammad. 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Temu Kaji Posisi dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen dalam Pembangunan. Jakarta: LAN

- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara;
- Usman, Sunyoto S. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Aksara;
- Yusnani. 1993. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta
- Tohidin. 2013. *Dampak Implementasi Kebijakan Terhadap Pengembangan Organisasi pada Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan*, Kota Bandung:
- Muhiddin. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM di*, Kabupaten Gowa:
- Sinurat. 2018. *Implementasi Pemberdayaan UKM pada Dinas Ketenagakerjaan KUKM di*, Sidikalang:
- Gunarto, G. 2017. *Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM di*, Kota Bandung:
- Iwan, Henri, Kusnadi. 2020. *Implementasi Kebijakan Pembinaan UMKM di*, Kabupaten Subang:
- Karla Meiva, et. al. 2021. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di*, Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa:
- Ridel, Christofel, Walean. 2021. *Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Produkif Usaha Mikro Bagi Pelaku UKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Koperasi Dan UKM*, Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara:

Marzuki, Sinuraya. 2020. *Implementasi Kebijakan Dalam Penyelamatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Masa Pandemi Covid-19 Di, Kota Pekanbaru:*

Risya, Tsania, Faula, Sufa. 2021. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dinas Perindustrian, Koperasi, Dan UKM, Kabupaten Kendal:*

Imam, Santoso, Wahyudi. 2020. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Satuan Pelaksanaan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan di, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan:*